

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 12 September 2022
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Pembahasan mengenai:
1. RKA K/L Tahun 2023; dan
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 45 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
3. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
4. Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);
5. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
6. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
7. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);

8. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan);
9. Ir. Teuku Nilwan, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal);
10. Ir. Ishartini (Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
11. Sigit Muhartono, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia; dan
12. Novinsa Indra, Kuasa Direktur Utama/Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam rangka membahas RKA K/L Tahun 2023 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp678.157.401.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp85.311.317.000,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp955.652.399.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.181.634.862.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.151.263.731.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp388.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah);
- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.383.637.166.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp523.500.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

- 2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp663.235.039.000,00** (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar **Rp1.234.900.000.000,00** (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
- 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan kebijakan pengawasan secara internal di Lingkup kementerian, dan berkoordinasi dengan inspektorat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah khususnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023.
- 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk konsisten dan fokus terhadap pemulihan ekonomi, khususnya terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan rumput laut, petambak garam, pemasar dan pengolah hasil perikanan, serta ke masyarakat pesisir dan ke pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang banyak merekrut/menyerap tenaga kerja, terutama untuk peningkatan produksi dan ekspor komoditas unggulan agar importasi produk kelautan perikanan dapat ditekan.
- 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan Juknis bantuan pemerintah untuk tahun 2023 di akhir tahun 2022 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar awal tahun 2023 bantuan pemerintah sudah bisa terdistribusi dengan baik.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuat menu kriteria teknis Dana Alokasi Khusus harus sesuai dengan kebutuhan daerah yang memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pegawai pendamping/penyuluh di daerah bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang akan mengakses sistem penyaluran dana kelola pinjaman permodalan BLU-LPMUKP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap konsisten dalam upaya pemberantasan pelaku *IUU Fishing*, *Destructive Fishing*, dan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke Luar Negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan perikanan dengan mengembangkan perikanan budidaya, khususnya lobster, rumput laut dan komoditas unggulan lainnya.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembuatan regulasi Pupuk Bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional di tahun 2023.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan/menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di seluruh wilayah Indonesia berbasis koperasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151